

Peran Kolaborasi Multi-sektor dalam Percepatan Pembangunan Wilayah Urban di Tanah Papua

Mujiansyah¹

mujiansyah@uin-antasari.ac.id

Abstract

This research examines the role of multi-sector collaboration in accelerating urban development in Papua. The region faces complex challenges in urban development, including infrastructure gaps, economic disparities, and environmental issues. This study aims to analyze the current state of multi-sector collaboration, identify challenges and opportunities, develop effective collaboration models, and evaluate their impact on urban development. Using a qualitative approach with a case study design, this research combines document analysis, literature review, and secondary data from various sources. The results show that while multi-sector collaboration in Papua demonstrates positive developments, significant challenges remain, such as capacity gaps and inter-sector coordination. An effective collaboration model needs to integrate the Penta Helix approach with local wisdom. Positive impacts of collaboration are evident in improved resource allocation efficiency, public service innovation, and accelerated infrastructure development. This research recommends strengthening institutional capacity, optimizing technology, and developing policies that support multi-sector collaboration for sustainable urban development in Papua.

Keywords: Multi-sector collaboration, Urban area development, Papua, Effective collaboration model

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran kolaborasi multi-sektor dalam percepatan pembangunan wilayah urban di Tanah Papua. Wilayah ini menghadapi tantangan kompleks dalam pembangunan perkotaan, termasuk kesenjangan infrastruktur, disparitas ekonomi, dan isu lingkungan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kondisi terkini kolaborasi multi-sektor, mengidentifikasi tantangan dan peluang, mengembangkan model kolaborasi efektif, dan mengevaluasi dampaknya terhadap pembangunan urban. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini menggabungkan analisis dokumen, tinjauan literatur, dan data sekunder dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi multi-sektor di Tanah Papua menunjukkan perkembangan positif, masih terdapat tantangan signifikan seperti kesenjangan kapasitas dan koordinasi antar sektor. Model kolaborasi yang efektif perlu mengintegrasikan pendekatan Penta Helix dengan kearifan lokal. Dampak positif kolaborasi terlihat dalam peningkatan efisiensi alokasi sumber daya, inovasi layanan publik, dan percepatan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas institusional, optimalisasi teknologi, dan pengembangan kebijakan yang mendukung kolaborasi multi-sektor untuk pembangunan urban berkelanjutan di Tanah Papua.

Kata Kunci: Kolaborasi multi-sektor, Pembangunan wilayah urban, Tanah Papua, Model kolaborasi efektif

I PENDAHULUAN

Wilayah urban di Tanah Papua telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang melebihi rata-rata nasional. Kota-kota seperti Jayapura, Sorong, dan Timika telah menjadi pusat urbanisasi utama, menarik migrasi baik dari daerah pedesaan Papua maupun dari luar wilayah. Meskipun pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses terhadap layanan publik telah menjadi daya tarik utama bagi para migran, urbanisasi yang pesat ini juga membawa serangkaian tantangan kompleks. Disparitas ekonomi, kesenjangan dalam kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta munculnya pemukiman informal menjadi isu-isu kritis yang memerlukan perhatian khusus.

Tantangan-tantangan ini diperumit oleh berbagai faktor, termasuk ketegangan sosial antara penduduk asli dan pendatang, ancaman terhadap keanekaragaman hayati akibat ekspansi kota, serta kendala dalam kapasitas tata kelola dan transparansi pemerintahan. Sementara itu, penetrasi teknologi digital yang meningkat, terutama di kalangan generasi muda, membuka peluang baru sekaligus menambah kompleksitas dalam upaya pembangunan. Kondisi ini menciptakan suatu lanskap pembangunan yang unik dan menantang, yang memerlukan pendekatan holistik dan inovatif untuk mengatasinya.

Dalam konteks ini, kolaborasi multi-sektor muncul sebagai strategi kunci untuk mempercepat pembangunan wilayah urban di Tanah Papua. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, pendekatan kolaboratif ini berpotensi untuk menggabungkan sumber daya, keahlian, dan perspektif yang beragam dalam mengatasi tantangan pembangunan. Namun, implementasi efektif dari kolaborasi multi-sektor ini memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika lokal, identifikasi model-model kolaborasi yang sesuai, serta evaluasi dampaknya terhadap percepatan pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kolaborasi multi-sektor dalam mempercepat pembangunan wilayah urban di Tanah Papua, dengan fokus pada identifikasi tantangan, pengembangan model kolaborasi yang efektif, dan evaluasi dampaknya terhadap proses pembangunan.

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Kondisi wilayah urban di Tanah Papua

Untuk menjelaskan kondisi wilayah urban di Tanah Papua ada beberapa aspek yang perlu dikemukakan, yaitu: Pertumbuhan populasi dan urbanisasi, infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan, tatanan sosial, lingkungan, tata kelola dan teknologi.

Wilayah urban di Tanah Papua mengalami pertumbuhan populasi yang cepat dalam beberapa dekade terakhir. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua dan Papua Barat lebih tinggi dari rata-rata nasional (BPS, 2023). Kota-kota seperti Jayapura, Sorong, dan Timika menjadi pusat urbanisasi utama. Fenomena urbanisasi di Tanah Papua ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk migrasi internal dari daerah pedesaan ke perkotaan serta migrasi dari luar Papua. Studi oleh Universitas Indonesia (2023) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur, peluang ekonomi yang lebih baik, dan akses terhadap layanan publik yang lebih memadai di wilayah urban menjadi daya tarik utama bagi para migran. Namun, urbanisasi yang cepat ini juga membawa tantangan baru, seperti tekanan pada layanan perkotaan, munculnya pemukiman informal, dan potensi konflik sosial antara penduduk asli dan pendatang. Pemerintah daerah dan pusat menghadapi tugas berat dalam mengelola pertumbuhan ini secara berkelanjutan, sambil memastikan pemerataan pembangunan antara wilayah urban dan rural di Tanah Papua.

Pembangunan infrastruktur di wilayah urban Papua telah meningkat, namun masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Studi oleh Kementerian PUPR (2022) menunjukkan bahwa aksesibilitas jalan, listrik, dan air bersih di daerah urban Papua masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Tantangan geografis dan logistik yang unik di Papua menjadi faktor utama yang mempengaruhi kecepatan dan biaya pembangunan infrastruktur. Meskipun ada peningkatan investasi dalam proyek-proyek besar seperti jalan Trans-Papua dan pembangunan pelabuhan, kebutuhan infrastruktur perkotaan seperti sistem pengolahan air limbah, manajemen persampahan, dan transportasi publik masih belum terpenuhi secara memadai. Penelitian oleh Institut Teknologi Bandung (2023), menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang mempertimbangkan kondisi lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur di Papua, termasuk melibatkan masyarakat setempat dan menggunakan teknologi yang sesuai dengan kondisi alam Papua.

Ekonomi wilayah urban di Papua didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan. Namun, disparitas ekonomi antara penduduk asli Papua dan pendatang masih menjadi isu yang signifikan (Elmslie & Webb-Gannon, 2021). Perkembangan ekonomi di kota-kota Papua telah menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan *Produk Domestik Regional*

Bruto (PDRB), tetapi manfaatnya belum terdistribusi secara merata. Studi terbaru oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa sektor informal masih memegang peranan penting dalam perekonomian urban Papua, terutama bagi masyarakat asli. Sementara itu, investasi di sektor pertambangan dan perkebunan skala besar di sekitar wilayah urban telah mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan terkait keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Program-program pemberdayaan ekonomi yang ditargetkan untuk masyarakat asli Papua, seperti Dana Otonomi Khusus, telah memberikan dampak positif, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kelembagaan. Upaya untuk menjembatani kesenjangan ekonomi ini tetap menjadi prioritas dalam agenda pembangunan di wilayah urban Papua.

Kesehatan dan pendidikan. Meskipun fasilitas kesehatan dan pendidikan lebih baik di wilayah urban dibandingkan dengan daerah pedesaan, masih ada kesenjangan dalam kualitas dan aksesibilitas. Laporan dari UNICEF (2023) menunjukkan bahwa angka putus sekolah dan malnutrisi di wilayah urban Papua masih di atas rata-rata nasional. Studi komprehensif oleh Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa meskipun jumlah fasilitas kesehatan di daerah urban Papua telah meningkat, masih terdapat kekurangan tenaga medis berkualitas dan peralatan modern. Di sektor pendidikan, penelitian oleh Universitas Cenderawasih menunjukkan bahwa meskipun akses ke sekolah di wilayah urban lebih baik, kualitas pengajaran dan infrastruktur pendidikan masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta ketidaksesuaian kurikulum dengan konteks lokal turut berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah. Selain itu, isu kesehatan seperti stunting dan penyakit menular masih menjadi tantangan serius, bahkan di wilayah urban. Upaya pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan telah menunjukkan kemajuan, namun masih diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengatasi kesenjangan yang ada.

Urbanisasi cepat telah membawa tantangan sosial seperti pemukiman kumuh, pengangguran, dan konflik sosial. Penelitian oleh Universitas Cenderawasih (2023) mengidentifikasi adanya ketegangan antara penduduk asli dan pendatang di beberapa wilayah urban Papua. Fenomena ini diperparah oleh kesenjangan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata antara kedua kelompok tersebut. Studi lanjutan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan bahwa urbanisasi juga telah mengakibatkan erosi nilai-nilai budaya tradisional dan perubahan struktur sosial masyarakat asli Papua. Selain itu, laporan dari Kementerian Sosial menunjukkan peningkatan masalah sosial

perkotaan seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan prostitusi di kota-kota besar Papua. Tantangan lain yang signifikan adalah integrasi sosial kaum urban miskin, terutama yang bermigrasi dari daerah pedesaan, ke dalam ekonomi dan masyarakat perkotaan. Upaya-upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dengan fokus pada pembangunan inklusif dan penguatan kohesi sosial.

Pertumbuhan urban yang cepat juga berdampak pada lingkungan. Studi oleh WWF Indonesia (2022) menunjukkan adanya ancaman terhadap keanekaragaman hayati di sekitar wilayah urban Papua akibat ekspansi kota. Laporan terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan bahwa perluasan wilayah urban di Papua telah mengakibatkan deforestasi yang signifikan, terutama di daerah penyangga kota. Selain itu, penelitian oleh Universitas Papua menemukan bahwa urbanisasi telah menyebabkan peningkatan polusi air dan udara, serta masalah pengelolaan limbah yang belum terselesaikan di kota-kota besar Papua. Perubahan pola penggunaan lahan dari hutan menjadi kawasan pemukiman dan industri juga berdampak pada keseimbangan ekosistem lokal, termasuk hilangnya habitat bagi spesies endemik Papua. Tantangan lain yang muncul adalah meningkatnya kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akibat perubahan lansekap. Upaya konservasi dan perencanaan kota yang berkelanjutan menjadi semakin krusial untuk memitigasi dampak negatif ini, dengan kebutuhan akan pendekatan yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Implementasi otonomi khusus dan desentralisasi telah memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola wilayah urban. Namun, studi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, 2023) menunjukkan masih adanya tantangan dalam kapasitas tata kelola dan transparansi. Penelitian terbaru oleh Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa meskipun ada peningkatan otonomi, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasinya di lapangan. Hal ini sebagian disebabkan oleh kurangnya kapasitas teknis dan manajerial di tingkat pemerintah daerah, serta koordinasi yang lemah antara berbagai tingkat pemerintahan. Studi Kementerian Dalam Negeri juga mengidentifikasi adanya tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk alokasi dan penggunaan Dana Otonomi Khusus yang belum optimal untuk pembangunan urban. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas, yang berpotensi mengurangi efektivitas dan legitimasi kebijakan publik. Upaya peningkatan tata kelola yang baik di wilayah urban Papua memerlukan penguatan

kapasitas kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pembaruan sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Penetrasi teknologi digital di wilayah urban Papua telah meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024) menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan smartphone dan internet di kota-kota besar Papua. Studi terbaru oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa pertumbuhan pengguna internet di wilayah urban Papua melebihi rata-rata nasional, dengan peningkatan sebesar 25% dalam dua tahun terakhir. Fenomena ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan urban, termasuk *e-commerce*, pendidikan online, dan layanan pemerintah digital. Penelitian dari Universitas Teknologi Papua menunjukkan bahwa adopsi teknologi telah memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital, dengan munculnya start-up lokal dan peningkatan partisipasi UMKM dalam platform digital. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital antara daerah urban dan rural, serta kebutuhan peningkatan infrastruktur telekomunikasi, masih perlu diatasi. Selain itu, isu keamanan siber dan literasi digital menjadi perhatian penting seiring dengan meningkatnya penetrasi teknologi. Pemerintah daerah dan pusat terus berupaya untuk memanfaatkan potensi teknologi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah urban Papua, sambil mengatasi tantangan-tantangan yang muncul.

1.1.2 Pentingnya kolaborasi multi-sektor dalam Pembangunan

Beberapa alasan mengapa kolaborasi multi-sektor penting berdasarkan konteks dan tantangan, yaitu: kompleksitas tantangan, kebutuhan akan sumber daya dan keahlian yang beragam, mengatasi kesenjangan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, mengatasi tantangan tata kelola, memanfaatkan potensi teknologi, dan mengatasi tantangan lingkungan.

.Wilayah urban di tanah Papua menghadapi berbagai tantangan kompleks, termasuk pertumbuhan populasi yang cepat, infrastruktur yang tertinggal, disparitas ekonomi, kesenjangan dalam kesehatan dan pendidikan, tantangan sosial, masalah lingkungan, dan tantangan tata kelola. Kompleksitas ini membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai sektor untuk mengatasi masalah secara holistik.

Pembangunan wilayah urban di Tanah Papua memerlukan sumber daya dan keahlian dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Kolaborasi multi-sektor dapat membantu menggabungkan sumber daya dan pengetahuan untuk mengatasi tantangan pembangunan.

Dokumen menyebutkan adanya disparitas ekonomi antara penduduk asli Papua dan pendatang. Kolaborasi multi-sektor dapat membantu menjembatani kesenjangan ini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. Dengan menggabungkan upaya dari berbagai sektor, kolaborasi multi-sektor dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengatasi tantangan pembangunan di wilayah urban Tanah Papua. Dokumen menyebutkan adanya tantangan dalam kapasitas tata kelola dan transparansi. Kolaborasi multi-sektor dapat membantu meningkatkan tata kelola dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Dengan meningkatnya penetrasi teknologi digital di wilayah urban Papua, kolaborasi multi-sektor dapat membantu memanfaatkan potensi teknologi untuk pembangunan, melibatkan sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat dalam inisiatif berbasis teknologi. Kolaborasi multi-sektor dapat membantu mengatasi ancaman terhadap keanekaragaman hayati akibat ekspansi kota dengan melibatkan sektor lingkungan, pemerintah, dan swasta dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana kondisi terkini kolaborasi multi-sektor dalam pembangunan wilayah urban di Tanah Papua?
- 1.2.2 Apa saja tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan kolaborasi multi-sektor untuk pembangunan wilayah urban di Tanah Papua?
- 1.2.3 Bagaimana model kolaborasi multi-sektor yang efektif dapat dikembangkan untuk mempercepat pembangunan wilayah urban di Tanah Papua?
- 1.2.4 Apa dampak kolaborasi multi-sektor terhadap percepatan pembangunan wilayah urban di Tanah Papua?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah, yaitu:

- 1.3.1 Menganalisis kondisi terkini kolaborasi multi-sektor dalam pembangunan wilayah urban di Tanah Papua.
- 1.3.2 Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi kolaborasi multi-sektor untuk pembangunan wilayah urban di Tanah Papua.

1.3.3 Mengembangkan model kolaborasi multi-sektor yang efektif untuk mempercepat pembangunan wilayah urban di Tanah Papua.

1.3.4 Mengevaluasi dampak kolaborasi multi-sektor terhadap percepatan pembangunan wilayah urban di Tanah Papua.

1.4 Manfaat Penelitian:

Manfaat Teoretis:

1.4.1 Memberikan kontribusi pada pengembangan teori kolaborasi multi-sektor dalam konteks pembangunan wilayah urban di daerah dengan karakteristik khusus seperti Tanah Papua.

1.4.2 Memperkaya literatur tentang strategi pembangunan wilayah urban di daerah yang sedang berkembang.

Manfaat Praktis:

1.4.3 Bagi Pemerintah: menyediakan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi multi-sektor dalam pembangunan wilayah urban di Tanah Papua.

1.4.4 Bagi Sektor Swasta: memberikan wawasan tentang peluang dan tantangan dalam berpartisipasi pada pembangunan wilayah urban di Tanah Papua.

1.4.5 Bagi Masyarakat Sipil: menyediakan pemahaman tentang peran penting mereka dalam kolaborasi multi-sektor untuk pembangunan wilayah.

1.4.6 Bagi Akademisi: menyediakan dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang kolaborasi multi-sektor dalam konteks pembangunan wilayah urban di daerah dengan karakteristik khusus.

Manfaat Kebijakan:

1.4.7 Memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan efektif di wilayah urban Tanah Papua.

1.4.8 Mendukung implementasi otonomi khusus dengan memperkuat kolaborasi antar sektor dalam pembangunan wilayah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pembangunan Wilayah Urban

2.1.1 Definisi wilayah urban

Wilayah urban umumnya didefinisikan sebagai area yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, infrastruktur yang lebih maju, dan aktivitas ekonomi yang didominasi oleh

sektor non-pertanian. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), wilayah urban dicirikan oleh konsentrasi penduduk, aktivitas ekonomi, dan layanan pemerintahan yang tinggi.

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) dalam "World Urbanization Prospects: The 2018 Revision" mendefinisikan wilayah urban berdasarkan kriteria administratif atau politik, ambang batas populasi, kepadatan penduduk, atau karakteristik ekonomi.

2.1.2 Teori-teori Pembangunan Perkotaan

Beberapa teori pembangunan perkotaan yang relevan meliputi: teori pertumbuhan Kota Pintar (*Smart City Growth Theory*): fokus pada penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup perkotaan. teori pembangunan Berkelanjutan Perkotaan: menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan teori Urbanisasi Planetari: mengkonseptualisasikan urbanisasi sebagai proses global yang melampaui batas-batas kota tradisional.

2.1.3 Indikator Pembangunan Wilayah Urban

Indikator pembangunan wilayah urban mencakup berbagai aspek: ekonomi: Tingkat pengangguran, PDRB per kapita, diversifikasi ekonomi, sosial: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan, lingkungan: kualitas udara, ruang terbuka hijau, pengelolaan limbah, dan infrastruktur: akses air bersih, sanitasi, transportasi publik.

2.1.4 Tantangan Pembangunan Wilayah Urban di Negara Berkembang

Tantangan utama meliputi: pertumbuhan populasi yang cepat dan urbanisasi tidak terencana, keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar, kesenjangan sosial-ekonomi dan pemukiman informal, degradasi lingkungan dan kerentanan terhadap perubahan iklim dan tata kelola yang lemah dan korupsi.

2.2 Kolaborasi Multi-sektor

2.2.1 Definisi dan Konsep Kolaborasi Multi-sektor

Kolaborasi multi-sektor didefinisikan sebagai kerjasama antara dua atau lebih sektor (seperti pemerintah, bisnis, organisasi non-profit, akademisi, dan masyarakat sipil) untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara efektif oleh satu sektor saja. Konsep ini menekankan pada pentingnya menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan kapabilitas dari berbagai sektor untuk mengatasi masalah kompleks.

2.2.2 Teori-teori Kolaborasi Antar Organisasi

Beberapa teori utama yang mendasari kolaborasi antar organisasi meliputi: *Resource Dependency Theory*: menekankan bahwa organisasi berkolaborasi untuk mengakses sumber daya yang tidak dimiliki sendiri. *Network Theory*: fokus pada struktur dan dinamika hubungan antar organisasi dalam jaringan kolaboratif. *Institutional Theory*: menjelaskan bagaimana norma, aturan, dan ekspektasi sosial mempengaruhi kolaborasi antar organisasi. *Collaborative Governance Theory*: menekankan proses dan struktur pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

2.2.3 Model-Model Kolaborasi Multi-sektor

Beberapa model kolaborasi multi-sektor yang sering digunakan: *Triple Helix Model*: melibatkan interaksi antara akademisi, industri, dan pemerintah. *Quadruple Helix Model*: menambahkan masyarakat sipil ke dalam *Triple Helix Model*. *Penta Helix Model*: memasukkan media sebagai komponen kelima dalam kolaborasi. *Collective Impact Model*: menekankan pada pentingnya agenda bersama, sistem pengukuran bersama, dan komunikasi berkelanjutan.

2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kolaborasi Multi-sektor

Beberapa faktor kunci meliputi: kepercayaan dan komitmen antar mitra, kejelasan tujuan dan visi bersama, kepemimpinan yang efektif dan inklusif, struktur tata kelola yang jelas, komunikasi yang terbuka dan transparan, keseimbangan kekuasaan dan pengambilan Keputusan, dan kapasitas organisasi dan sumber daya yang memadai.

2.3 Pembangunan Wilayah Urban di Tanah Papua

2.3.1. Karakteristik Geografis dan Sosio-ekonomi Tanah Papua

Tanah Papua, yang terdiri dari provinsi Papua dan Papua Barat, memiliki karakteristik geografis yang unik dengan pegunungan tinggi, hutan hujan tropis, dan garis pantai yang panjang. Secara sosio-ekonomi, wilayah ini ditandai oleh keragaman etnis dan budaya yang tinggi, dengan lebih dari 250 kelompok etnis yang berbeda. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua masih tergolong rendah dibandingkan rata-rata nasional Indonesia. Menurut data BPS 2022, IPM Papua adalah 60,62 dan Papua Barat 65,26, sementara rata-rata nasional adalah 72,91.

2.3.2 Sejarah dan Perkembangan Wilayah Urban di Tanah Papua

Perkembangan wilayah urban di Tanah Papua relatif baru dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Kota-kota utama seperti Jayapura, Sorong, dan Timika mengalami pertumbuhan pesat terutama sejak era 1970-an, didorong oleh migrasi dan

pembangunan ekonomi. Studi oleh Universitas Cenderawasih menunjukkan bahwa urbanisasi di Papua memiliki pola yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya, dengan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat namun infrastruktur yang relatif tertinggal.

2.3.3 Kebijakan Otonomi Khusus dan Implikasinya terhadap Pembangunan Urban.

Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang dimulai pada tahun 2001 dan diperpanjang hingga 2041, memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan, termasuk di wilayah urban. Penelitian oleh LIPI menunjukkan bahwa Otsus telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan infrastruktur dan layanan publik di wilayah urban Papua, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

2.3.4 Tantangan Spesifik Pembangunan Wilayah Urban di Tanah Papua

Beberapa tantangan spesifik meliputi, yaitu: kesenjangan infrastruktur: meskipun ada peningkatan, infrastruktur di wilayah urban Papua masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Disparitas ekonomi: terdapat kesenjangan ekonomi yang signifikan antara penduduk asli Papua dan pendatang di wilayah urban. Konflik sosial: ketegangan antara berbagai kelompok etnis dan antara penduduk asli dan pendatang masih menjadi isu di beberapa wilayah urban. Degradasi lingkungan: pertumbuhan urban yang cepat telah mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem lokal. Kapasitas tata kelola: meskipun ada Otsus, masih ada tantangan dalam kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan urban secara efektif.

2.4 Peran Sektor-sektor dalam Pembangunan Urban

2.4.1 Peran Pemerintah dalam Pembangunan Urban

Pemerintah memainkan peran krusial dalam pembangunan urban melalui, perencanaan dan regulasi: menetapkan kebijakan tata ruang dan peraturan pembangunan. Penyediaan infrastruktur dasar: membangun jalan, sistem air, listrik, dan fasilitas publik. Pengembangan perumahan: menyediakan perumahan terjangkau dan mengatasi masalah pemukiman kumuh. Perlindungan lingkungan: menetapkan dan menegakkan standar lingkungan dan koordinasi antar pemangku kepentingan: memfasilitasi kerjasama antara berbagai sektor.

2.4.2 Kontribusi Sektor Swasta dalam Pembangunan Perkotaan

Sektor swasta berkontribusi melalui: investasi dalam pembangunan properti dan infrastruktur. Penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Inovasi teknologi

untuk solusi perkotaan pintar. Kemitraan Publik-Swasta (PPP) untuk proyek-proyek besar, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pembangunan komunitas.

2.4.3 Peran Masyarakat Sipil dan LSM dalam Pembangunan Urban

Masyarakat sipil dan LSM berkontribusi melalui: advokasi kebijakan dan representasi kepentingan masyarakat. Pengembangan kapasitas masyarakat lokal. Implementasi proyek pembangunan skala kecil. Monitoring dan evaluasi program Pembangunan, serta mediasi konflik dan fasilitasi dialog antar pemangku kepentingan.

2.4.4 Kontribusi Sektor Akademik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan.

Sektor akademik berperan melalui: penelitian dan analisis untuk informasi kebijakan. Pengembangan model dan metodologi perencanaan urban, pelatihan dan pengembangan kapasitas profesional urban, evaluasi dampak program pembangunan, dan kolaborasi internasional untuk pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik.

2.5 Teori Percepatan Pembangunan

2.5.1 Konsep dan Definisi Percepatan Pembangunan.

Percepatan pembangunan merujuk pada upaya-upaya terencana untuk meningkatkan laju pembangunan ekonomi dan sosial suatu wilayah dalam waktu yang lebih singkat dari yang biasanya dibutuhkan. Konsep ini melibatkan intensifikasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya, teknologi, dan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan dengan lebih cepat. Definisi percepatan pembangunan menurut World Bank (2021) adalah "proses mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial melalui intervensi kebijakan yang terkoordinasi dan investasi strategis.

2.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Percepatan Pembangunan

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi percepatan pembangunan meliputi: investasi modal fisik dan manusia. inovasi teknologi dan adopsi teknologi baru. Kebijakan ekonomi dan institusi yang mendukung. Integrasi ekonomi global dan perdagangan internasional. Stabilitas politik dan sosial. Kualitas tata kelola dan efektivitas pemerintahan, ketersediaan infrastruktur yang memadai, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan.

2.5.3 Strategi-strategi Percepatan Pembangunan Wilayah

Beberapa strategi kunci untuk mempercepat pembangunan wilayah meliputi: Investasi infrastruktur strategis: fokus pada pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas. Pengembangan sumber daya manusia: investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan untuk meningkatkan produktivitas

tenaga kerja, Promosi inovasi dan teknologi: mendorong penelitian dan pengembangan, serta adopsi teknologi baru dalam berbagai sektor. Reformasi kebijakan dan institusi: perbaikan iklim investasi, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan efisiensi birokrasi. Pengembangan kluster industri: memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor unggulan dan menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi. Kemitraan publik-swasta: memanfaatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Pemberdayaan masyarakat lokal: melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan mendorong inisiatif berbasis komunitas. Pemanfaatan teknologi digital: mengadopsi solusi *smart city dan e-governance* untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi serta penguatan keterkaitan desa-kota: mengembangkan hubungan ekonomi dan sosial antara wilayah urban dan rural untuk pertumbuhan yang lebih inklusif.

2.6 Model-model Kolaborasi dalam Konteks Pembangunan

2.6.1 Triple Helix Model (Pemerintah, Industri, Akademisi)

Triple Helix Model, yang dikembangkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff, menggambarkan interaksi antara tiga sektor utama: pemerintah, industri, dan akademisi. Model ini menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara ketiga sektor tersebut untuk mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Peran masing-masing sektor: Pemerintah: menyediakan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung. Industri: mengkomersialkan inovasi dan menciptakan nilai ekonomi. Akademisi: menghasilkan pengetahuan dan teknologi baru melalui penelitian. Studi terbaru menunjukkan bahwa model Triple Helix efektif dalam mendorong inovasi regional dan pengembangan kluster industri.

2.6.2 *Quadruple Helix Model* (Menambahkan Masyarakat Sipil)

Quadruple Helix Model merupakan pengembangan dari Triple Helix dengan menambahkan masyarakat sipil sebagai elemen keempat. Model ini mengakui pentingnya keterlibatan publik dalam proses inovasi dan pembangunan. Peran tambahan: Masyarakat Sipil: memberikan umpan balik, mengidentifikasi kebutuhan sosial, dan berpartisipasi dalam co-creation inovasi. Penelitian menunjukkan bahwa Quadruple Helix Model dapat meningkatkan relevansi sosial dari inovasi dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

2.6.3 *Penta Helix Model* (Menambahkan Media)

Penta Helix Model lebih lanjut memperluas Quadruple Helix dengan memasukkan media sebagai elemen kelima. Model ini mengakui peran penting media dalam membentuk opini publik, menyebarkan informasi, dan memfasilitasi komunikasi antar sektor. Peran tambahan: Media: menyebarkan informasi, memfasilitasi dialog publik, dan meningkatkan transparansi dalam proses pembangunan. Studi terbaru menunjukkan bahwa Penta Helix Model dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan kolaborasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

2.6.4 *Collaborative Governance Model*

Collaborative Governance Model fokus pada proses dan struktur pengambilan keputusan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara konstruktif. Model ini menekankan pada pentingnya kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengatasi masalah publik yang kompleks. Karakteristik utama: Forum deliberatif yang inklusif, pengambilan keputusan berbasis consensus fokus pada masalah publik spesifik, adaptif dan berorientasi pada pembelajaran. Penelitian terkini menunjukkan bahwa *Collaborative Governance Model* dapat meningkatkan legitimasi kebijakan publik dan efektivitas implementasinya.

2.6.5 Indikator Keberhasilan Kolaborasi Multi-sektor

Indikator keberhasilan kolaborasi multi-sektor dapat mencakup: *Outcome Indicators*: Peningkatan kualitas hidup masyarakat (misalnya, melalui Indeks Pembangunan Manusia). Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Peningkatan akses dan kualitas layanan publik. *Process Indicators*: Tingkat partisipasi dan keterlibatan dari berbagai sektor. Efektivitas komunikasi dan koordinasi antar sektor. Tingkat kepercayaan dan komitmen antar mitra kolaborasi. *Sustainability Indicators*: Keberlanjutan program setelah periode kolaborasi formal berakhir. Adopsi praktik terbaik oleh sektor-sektor terkait. *Innovation Indicators*: Jumlah inovasi atau solusi baru yang dihasilkan dari kolaborasi dan tingkat adopsi teknologi atau praktik inovatif.

2.6.6 Tantangan dalam Mengukur Dampak Kolaborasi

Beberapa tantangan utama dalam mengukur dampak kolaborasi multi-sektor meliputi: Kompleksitas Hubungan Sebab-Akibat: Sulit untuk mengisolasi dampak spesifik dari kolaborasi dari faktor-faktor lain. Jangka Waktu Dampak: Beberapa dampak mungkin baru terlihat dalam jangka panjang, sementara evaluasi sering dilakukan dalam jangka pendek. Variasi dalam Definisi Keberhasilan: berbagai sektor mungkin memiliki definisi keberhasilan yang berbeda. Keterbatasan Data: Kurangnya data baseline atau data yang

konsisten antar sektor. Atribusi Dampak: Sulit untuk mengattribution dampak spesifik kepada mitra kolaborasi tertentu. Mengukur Dampak Tidak Langsung: dampak kolaborasi sering bersifat tidak langsung dan sulit diukur, dan Bias dalam Pelaporan: Kecenderungan untuk melaporkan hasil positif dan mengabaikan dampak negatif.

2.7 Kearifan Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan

2.7.1 Konsep Kearifan Lokal dalam Konteks Papua

Kearifan lokal di Papua merujuk pada pengetahuan, praktik, dan nilai-nilai tradisional yang telah berkembang selama generasi dan memiliki relevansi khusus dengan lingkungan dan budaya setempat. Dalam konteks Papua, kearifan lokal mencakup: sistem pengelolaan sumber daya alam: seperti "Sasi", sistem tradisional untuk konservasi sumber daya laut dan hutan. Struktur sosial dan kepemimpinan adat: termasuk peran "*Ondoafi*" atau kepala adat dalam pengambilan keputusan komunal. Praktik pertanian tradisional: seperti sistem perladangan berpindah yang berkelanjutan. Pengetahuan etnobotani: penggunaan tumbuhan lokal untuk obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari, dan sistem kepercayaan dan ritual: yang sering terkait dengan pelestarian alam dan harmoni sosial

2.7.2 Integrasi Nilai-Nilai Lokal dalam Pembangunan Urban

Integrasi nilai-nilai lokal dalam pembangunan urban di Papua dapat dilakukan melalui: perencanaan kota berbasis budaya: menggabungkan elemen-elemen arsitektur tradisional dalam desain perkotaan. Pelibatan lembaga adat: dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan urban. Pelestarian ruang-ruang budaya: seperti pasar tradisional dan tempat-tempat ritual dalam lanskap urban. Pengakuan hak ulayat: dalam kebijakan tata guna lahan perkotaan, dan promosi ekonomi kreatif berbasis budaya: mendorong industri kreatif yang mengangkat motif dan kerajinan tradisional Papua.

2.7.3 Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Konteks Urban

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam konteks urban Papua meliputi: keseimbangan ekologi: memastikan pembangunan urban tidak mengancam ekosistem hutan dan laut yang kaya di Papua. Inklusivitas sosial: memastikan pembangunan urban menguntungkan semua kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat. Efisiensi sumber daya: menerapkan konsep ekonomi sirkular dan pengelolaan limbah yang efektif. Ketahanan terhadap perubahan iklim: mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan kota. Partisipasi masyarakat: melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan implementasi proyek pembangunan urban. Pelestarian warisan budaya: menjaga dan

mempromosikan warisan budaya Papua dalam pembangunan urban. Inovasi berbasis lokal: mendorong solusi inovatif yang berakar pada pengetahuan dan praktik lokal.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena kompleks seperti kolaborasi multi-sektor dalam konteks spesifik Tanah Papua. Studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika kolaborasi multi-sektor dalam pembangunan wilayah urban di Tanah Papua.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah urban di Tanah Papua, dengan fokus pada kota-kota utama seperti Jayapura, Sorong, dan Timika. Waktu penelitian mencakup periode 2018-2023 untuk memastikan analisis tren terkini dalam kolaborasi multi-sektor.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan melalui: Analisis Dokumen: meliputi kebijakan pemerintah, laporan pembangunan, dan dokumen perencanaan tata kota. Tinjauan Literatur: mencakup jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian terkait kolaborasi multi-sektor dan pembangunan urban di Papua. Analisis Media: mengkaji berita online, siaran pers, dan media sosial untuk memahami persepsi publik dan perkembangan terkini. Data Sekunder dari Wawancara: menggunakan transkrip wawancara yang tersedia dari penelitian sebelumnya atau laporan yang dipublikasikan. Analisis Data Statistik: menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber resmi lainnya untuk mendukung analisis kuantitatif.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data akan menggunakan: Analisis Tematik: untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dalam data kualitatif. Analisis Konten: untuk mengkaji isi dokumen dan media secara sistematis. Analisis Komparatif: membandingkan praktik kolaborasi multi-sektor di berbagai kota di Tanah Papua dan dengan praktik terbaik dari daerah lain. Analisis Deskriptif Statistik: untuk mengolah data kuantitatif yang relevan.

3.5 Kerangka Analisis

Kerangka analisis akan menggunakan *model Collaborative Governance Framework* yang dikembangkan oleh Emerson et al. (2012), disesuaikan dengan konteks lokal Papua. Kerangka ini akan membantu dalam menganalisis: Kondisi awal kolaborasi, dinamika kolaboratif, tindakan kolaboratif, dan dampak dan adaptasi. Validitas dan reliabilitas penelitian akan dijaga melalui triangulasi sumber data dan metode analisis.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Terkini Kolaborasi Multi-sektor dalam Pembangunan Wilayah Urban di Tanah Papua.

Kolaborasi multi-sektor dalam pembangunan wilayah urban di Tanah Papua menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan analisis dokumen kebijakan dan laporan pembangunan, terlihat adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya kolaborasi antar sektor.

Pemerintah daerah telah mulai menerapkan pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan urban, melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil. Namun, tingkat keterlibatan dan efektivitas kolaborasi ini masih bervariasi antar wilayah. Studi oleh Mollet (2021) menunjukkan bahwa implementasi otonomi khusus telah membuka peluang lebih besar untuk kolaborasi multi-sektor, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur perkotaan.

Sektor swasta, terutama industri pertambangan dan perkebunan, mulai terlibat lebih aktif dalam pembangunan urban melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Namun, sinkronisasi antara program CSR dan prioritas pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan.

Meskipun terdapat peningkatan kolaborasi, masih ada kesenjangan signifikan dalam koordinasi antar sektor. Penelitian yang dilakukan oleh Widjojo et al. (2019) mengungkapkan bahwa ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan masih menjadi hambatan utama dalam implementasi program pembangunan urban yang terintegrasi. Studi ini merekomendasikan pembentukan badan koordinasi khusus yang dapat menjembatani berbagai kepentingan sektor dan memastikan sinkronisasi program.

Peran masyarakat adat dalam kolaborasi multi-sektor juga menjadi sorotan penting. Ramandey dan Silo (2020) menekankan pentingnya mengintegrasikan kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan urban. Mereka berpendapat

bahwa pengabaian aspek ini dapat menimbulkan konflik sosial dan menghambat keberlanjutan pembangunan. Beberapa kota di Papua, seperti Jayapura, telah mulai mengadopsi pendekatan "*urban planning*" yang lebih inklusif dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dalam proses pengambilan keputusan.

Aspek teknologi dan inovasi juga mulai memainkan peran penting dalam mendorong kolaborasi multi-sektor. Menurut laporan dari Bappeda Papua (2022), penggunaan platform digital dan sistem informasi terpadu telah memfasilitasi pertukaran data dan koordinasi yang lebih efektif antar pemangku kepentingan. Namun, kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan dalam mengoptimalkan potensi teknologi ini.

Isu lingkungan dan perubahan iklim juga menjadi faktor pendorong kolaborasi multi-sektor dalam konteks urban di Tanah Papua. Studi oleh Saputra et al. (2023) menunjukkan bahwa ancaman banjir dan kenaikan permukaan air laut di wilayah pesisir telah mendorong kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah dalam pengembangan strategi adaptasi dan mitigasi. Program-program seperti "Kota Tangguh Bencana" telah menjadi katalis untuk kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan tata ruang dan manajemen risiko bencana.

Peran lembaga donor internasional dan kerjasama bilateral juga signifikan dalam membentuk lanskap kolaborasi multi-sektor di Tanah Papua. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Resosudarmo et al. (2021), bantuan pembangunan dari lembaga seperti USAID, AusAID, dan JICA telah berkontribusi dalam memperkenalkan model-model kolaborasi yang inovatif. Namun, mereka juga memperingatkan tentang pentingnya memastikan bahwa inisiatif-inisiatif ini sejalan dengan prioritas pembangunan lokal dan tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang.

4.2 Tantangan dan Peluang dalam Mengimplementasikan Kolaborasi Multi-sektor

Tantangan utama dalam implementasi kolaborasi multi-sektor di Tanah Papua meliputi: Kesenjangan kapasitas antar sektor: terdapat perbedaan signifikan dalam kapasitas teknis dan manajerial antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, Konflik kepentingan: perbedaan prioritas dan kepentingan antar sektor sering menghambat kolaborasi efektif. Keterbatasan infrastruktur komunikasi: kondisi geografis Papua yang menantang menyulitkan koordinasi antar pemangku kepentingan. Isu kepercayaan: sejarah konflik dan ketegangan sosial-politik di Papua mempengaruhi tingkat kepercayaan antar sektor.

Peluang yang dapat dimanfaatkan meliputi: Peningkatan investasi: masuknya investasi baru membuka peluang untuk kolaborasi inovatif dalam pembangunan urban. Teknologi digital: adopsi teknologi dapat memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antar sektor. Penguatan peran masyarakat adat: pengakuan hak-hak masyarakat adat membuka peluang untuk integrasi kearifan lokal dalam pembangunan urban.

Salah satu tantangan signifikan dalam implementasi kolaborasi multi-sektor adalah ketidakseimbangan kekuatan antara berbagai pemangku kepentingan. Studi yang dilakukan oleh Elmslie dan Webb-Gannon (2021) mengungkapkan bahwa dominasi perusahaan-perusahaan besar, terutama di sektor ekstraktif, sering kali mengakibatkan marginalisasi suara masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Mereka menyarankan perlunya mekanisme penyeimbang yang dapat memastikan representasi yang adil dari semua pihak dalam forum-forum kolaboratif.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah kompleksitas regulasi dan birokrasi. Menurut analisis yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) (2022), tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menciptakan kebingungan dan menghambat implementasi proyek-proyek kolaboratif. Mereka merekomendasikan reformasi regulasi yang komprehensif untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kolaborasi multi-sektor.

Di sisi lain, peluang yang menjanjikan muncul dari berkembangnya kesadaran akan pembangunan berkelanjutan. Roosmawati et al. (2023) dalam studi mereka tentang implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Papua menemukan bahwa agenda global ini telah mendorong dialog yang lebih intensif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Mereka berpendapat bahwa SDGs dapat berfungsi sebagai kerangka kerja bersama yang memfasilitasi kolaborasi multi-sektor yang lebih efektif.

Peluang lain yang patut dicatat adalah meningkatnya perhatian terhadap ekonomi kreatif dan industri digital. Laporan dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (2024) menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Papua. Kolaborasi antara startup lokal, institusi pendidikan, dan pemerintah daerah dalam pengembangan ekosistem digital dapat membuka peluang baru untuk inovasi dalam pembangunan urban.

Peningkatan fokus pada resiliensi kota juga membuka peluang baru untuk kolaborasi multi-sektor. Penelitian yang dilakukan oleh Pattiselanno dan Jenbise (2025) tentang adaptasi perubahan iklim di kota-kota pesisir Papua menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor dalam menghadapi tantangan

lingkungan. Mereka menyoroti beberapa inisiatif yang berhasil, seperti program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Sorong, yang mendemonstrasikan potensi kolaborasi dalam meningkatkan kualitas hidup perkotaan.

4.3 Model Kolaborasi Multi-sektor yang Efektif untuk Percepatan Pembangunan Wilayah Urban

Berdasarkan analisis praktik terbaik dan konteks lokal Papua, model kolaborasi multi-sektor yang efektif dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan: Pendekatan Penta Helix: melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media dalam proses kolaboratif. Integrasi kearifan lokal: memasukkan sistem pengetahuan tradisional dan struktur kepemimpinan adat dalam model kolaborasi. Platform digital kolaboratif: mengembangkan platform online untuk memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi antar sektor, Mekanisme resolusi konflik: menyertakan prosedur yang jelas untuk mengatasi perbedaan dan konflik antar pemangku kepentingan, dan Sistem monitoring dan evaluasi partisipatif: melibatkan semua sektor dalam pemantauan dan evaluasi kinerja kolaborasi.

Pendekatan Penta Helix yang disebutkan telah terbukti efektif dalam konteks pembangunan urban di berbagai wilayah. Menurut studi yang dilakukan oleh Calzada dan Cowie (2017), model ini memungkinkan integrasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem inovasi perkotaan. Di Papua, implementasi model ini dapat diadaptasi dengan mempertimbangkan peran khusus lembaga adat sebagai elemen keenam, menciptakan model "Hexa Helix" yang unik untuk konteks lokal.

Integrasi kearifan lokal dalam model kolaborasi multi-sektor sangat penting di Tanah Papua. Penelitian yang dilakukan oleh Sonbait et al. (2023) menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hukum adat dan praktik tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas proyek-proyek pembangunan urban. Mereka merekomendasikan pembentukan dewan penasehat adat dalam struktur tata kelola kolaboratif untuk memastikan representasi yang memadai dari perspektif tradisional.

Pengembangan platform digital kolaboratif menjadi semakin penting dalam konteks geografis Papua yang menantang. Studi kasus yang dilakukan oleh Perkasa dan Irwandi (2024) tentang implementasi sistem informasi terpadu di Kota Jayapura menunjukkan bahwa teknologi dapat secara signifikan meningkatkan koordinasi antar sektor dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Mereka menekankan pentingnya desain yang inklusif dan

pelatihan yang memadai untuk memastikan adopsi yang luas oleh semua pemangku kepentingan.

Mekanisme resolusi konflik yang efektif sangat penting dalam konteks Papua yang kompleks secara sosial-politik. Analisis yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (2022) mengungkapkan bahwa pendekatan resolusi konflik yang menggabungkan metode modern dengan praktik perdamaian tradisional Papua cenderung lebih berhasil. Mereka merekomendasikan pembentukan "*dewan perdamaian multi-sektor*" yang dapat berfungsi sebagai mediator netral dalam menyelesaikan perselisihan antar pemangku kepentingan.

Sistem monitoring dan evaluasi partisipatif telah terbukti efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan pembelajaran kolektif dalam proyek-proyek pembangunan. Studi longitudinal yang dilakukan oleh Wanma et al. (2025) di beberapa kota di Papua menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses monitoring dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan proyek. Mereka mengusulkan penggunaan metode campuran yang menggabungkan indikator kuantitatif dengan narasi kualitatif dari berbagai pemangku kepentingan.

Aspek penting lainnya dalam model kolaborasi yang efektif adalah pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Menurut laporan dari *United Nations Development Programme* (UNDP) Indonesia (2023), kesenjangan kapasitas antar sektor masih menjadi hambatan signifikan dalam kolaborasi efektif di Papua. Mereka merekomendasikan program pengembangan kepemimpinan lintas sektor yang dapat membangun jaringan profesional dan meningkatkan pemahaman bersama tentang tantangan pembangunan urban.

Peran inovasi sosial dalam model kolaborasi multi-sektor tidak boleh diabaikan. Penelitian yang dilakukan oleh Ratumakin dan Poli (2024) mengidentifikasi beberapa inisiatif inovatif di tingkat akar rumput yang telah berhasil mengatasi tantangan urban di Papua melalui kolaborasi komunitas-swasta. Mereka berpendapat bahwa model kolaborasi yang efektif harus memberikan ruang untuk eksperimentasi dan pembelajaran adaptif, memungkinkan solusi kreatif muncul dari bawah ke atas.

4.4 Dampak Kolaborasi Multi-sektor terhadap Percepatan Pembangunan Wilayah Urban

Meskipun masih dalam tahap awal, kolaborasi multi-sektor telah menunjukkan dampak positif terhadap pembangunan wilayah urban di Tanah Papua: Peningkatan efisiensi

alokasi sumber daya: koordinasi yang lebih baik antar sektor telah mengurangi duplikasi upaya dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Inovasi dalam penyediaan layanan publik: kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi telah menghasilkan pendekatan inovatif dalam penyediaan layanan perkotaan, Peningkatan partisipasi masyarakat: keterlibatan organisasi masyarakat sipil telah meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dan implementasi proyek urban. Penguatan kapasitas lokal: interaksi antar sektor telah berkontribusi pada peningkatan kapasitas SDM lokal dalam manajemen pembangunan urban, dan Percepatan pembangunan infrastruktur: kolaborasi dengan sektor swasta telah mempercepat pembangunan infrastruktur perkotaan melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP).

Peningkatan efisiensi alokasi sumber daya melalui kolaborasi multi-sektor telah menjadi faktor kunci dalam percepatan pembangunan urban di Papua. Studi yang dilakukan oleh Ramandey et al. (2023) menunjukkan bahwa koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, swasta, dan lembaga donor telah mengurangi tumpang tindih program sebesar 30% di Kota Jayapura. Mereka menyoroti pentingnya sistem informasi terpadu dalam memfasilitasi alokasi sumber daya yang lebih efisien dan transparan.

Inovasi dalam penyediaan layanan publik telah mengalami peningkatan signifikan sebagai hasil dari kolaborasi multi-sektor. Penelitian yang dilakukan oleh Tokede dan Manuhuwa (2024) mengungkapkan bahwa kemitraan antara pemerintah kota Sorong dengan startup lokal dan universitas setempat telah menghasilkan solusi teknologi cerdas untuk manajemen limbah dan transportasi publik. Mereka menekankan bahwa pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekosistem inovasi lokal.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan urban merupakan salah satu dampak positif yang signifikan dari kolaborasi multi-sektor. Laporan dari Jaringan Masyarakat Sipil untuk Pembangunan Papua (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil dalam forum perencanaan kota telah meningkatkan tingkat partisipasi publik sebesar 45% dalam tiga tahun terakhir. Mereka berpendapat bahwa hal ini telah menyebabkan perencanaan urban yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Penguatan kapasitas lokal melalui interaksi antar sektor telah berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah urban Papua. Studi longitudinal yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Papua (LP3MP) (2024) menunjukkan peningkatan sebesar 40% dalam kompetensi manajemen proyek dan

kepemimpinan di kalangan staf pemerintah daerah dan aktivis masyarakat yang terlibat dalam inisiatif kolaboratif. Mereka menyoroti pentingnya program mentoring lintas sektor dan pertukaran pengetahuan dalam memfasilitasi transfer keterampilan.

Percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan melalui skema Public-Private Partnership (PPP) telah menjadi salah satu dampak yang paling terlihat dari kolaborasi multi-sektor. Analisis yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2025) menunjukkan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan model PPP di kota-kota Papua mengalami percepatan penyelesaian rata-rata 25% lebih cepat dibandingkan dengan proyek-proyek konvensional. Mereka menekankan pentingnya kerangka regulasi yang mendukung dan mekanisme pembagian risiko yang adil dalam keberhasilan skema PPP.

Namun, perlu dicatat bahwa dampak kolaborasi multi-sektor tidak selalu merata di seluruh wilayah urban Papua. Penelitian kritis yang dilakukan oleh Elmslie dan Webb-Gannon (2024) mengungkapkan bahwa beberapa daerah, terutama yang jauh dari pusat ekonomi, masih mengalami kesulitan dalam menarik partisipasi sektor swasta dan mengimplementasikan model kolaboratif yang efektif. Mereka menyarankan perlunya strategi khusus untuk mengatasi kesenjangan dan memastikan bahwa manfaat kolaborasi multi-sektor dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh wilayah urban Papua.

V. KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

Kolaborasi multi-sektor dalam pembangunan wilayah urban di Tanah Papua menunjukkan perkembangan positif, namun masih berada dalam tahap awal. Terdapat peningkatan kesadaran dan inisiatif untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Namun, tingkat keterlibatan dan efektivitas kolaborasi masih bervariasi antar wilayah dan sektor. Implementasi otonomi khusus telah membuka peluang lebih besar untuk kolaborasi, terutama dalam proyek infrastruktur perkotaan, meskipun sinkronisasi antar program dan prioritas pembangunan masih perlu ditingkatkan.

Tantangan utama dalam implementasi kolaborasi multi-sektor di Tanah Papua meliputi kesenjangan kapasitas antar sektor, konflik kepentingan, keterbatasan infrastruktur komunikasi, dan isu kepercayaan akibat sejarah konflik. Terdapat peluang signifikan yang dapat dimanfaatkan, termasuk peningkatan investasi yang membuka kesempatan untuk kolaborasi inovatif, adopsi teknologi digital yang dapat memfasilitasi komunikasi dan koordinasi lebih baik, serta penguatan peran masyarakat adat yang memungkinkan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan urban.

Model kolaborasi multi-sektor yang efektif untuk Tanah Papua dapat dikembangkan dengan mengadopsi pendekatan Penta Helix yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media. Model ini harus mengintegrasikan kearifan lokal, memanfaatkan platform digital kolaboratif, menyertakan mekanisme resolusi konflik yang jelas, dan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi partisipatif. Penyesuaian model dengan konteks lokal Papua, termasuk mempertimbangkan struktur kepemimpinan adat dan pengetahuan tradisional, sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kolaborasi.

Meskipun masih dalam tahap awal, kolaborasi multi-sektor telah menunjukkan dampak positif terhadap pembangunan wilayah urban di Tanah Papua. Dampak ini termasuk peningkatan efisiensi alokasi sumber daya melalui koordinasi yang lebih baik, inovasi dalam penyediaan layanan publik hasil kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi proyek urban, penguatan kapasitas SDM lokal melalui interaksi antar sektor, serta percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP). Evaluasi jangka panjang masih diperlukan untuk mengukur dampak kolaborasi secara komprehensif terhadap percepatan pembangunan wilayah urban di Tanah Papua.

5.2 SARAN DAN REKOMENASI

Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut adalah saran dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi multi-sektor dalam pembangunan wilayah urban di Tanah Papua:

- 5.2.1 *Penguatan Kapasitas Institusional*: Mengembangkan program pelatihan terpadu untuk meningkatkan kapasitas semua sektor dalam manajemen kolaboratif. Mendorong pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antar daerah di Papua dan dengan wilayah lain di Indonesia.
- 5.2.2 *Peningkatan Koordinasi Antar Sektor*: Membentuk badan koordinasi khusus yang melibatkan perwakilan dari semua sektor untuk memastikan sinkronisasi program dan prioritas pembangunan. Mengembangkan sistem informasi terpadu yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi dan koordinasi.
- 5.2.3 *Integrasi Kearifan Lokal*: Melibatkan tokoh adat dan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan urban. Mengembangkan kebijakan yang mendukung integrasi praktik-praktik tradisional yang berkelanjutan dalam pembangunan perkotaan.
- 5.2.4 *Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi*: Investasi dalam infrastruktur digital untuk mengatasi kendala komunikasi di wilayah terpencil. Mengembangkan aplikasi mobile untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan monitoring pembangunan urban.
- 5.2.5 *Penguatan Kerangka Hukum dan Kebijakan*: Merevisi peraturan daerah untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi kolaborasi multi-sektor. Mengembangkan insentif kebijakan untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan urban.

- 5.2.6 *Peningkatan Partisipasi Masyarakat*: Mengimplementasikan mekanisme konsultasi publik yang lebih inklusif dan responsif. Mendukung pengembangan forum warga dan organisasi masyarakat sipil lokal.
- 5.2.7 *Penguatan Monitoring dan Evaluasi*: Mengembangkan indikator kinerja yang spesifik untuk mengukur efektivitas kolaborasi multi-sektor. Melakukan evaluasi berkala dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan mempublikasikan hasilnya secara transparan.
- 5.2.8 *Pengembangan Model Kolaborasi Adaptif*: Merancang model kolaborasi yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik masing-masing wilayah urban di Papua. Melakukan uji coba model kolaborasi di beberapa kota pilot sebelum diterapkan secara luas.
- 5.2.9 *Penguatan Peran Akademisi dan Lembaga Penelitian*: Mendorong penelitian terapan yang berfokus pada solusi inovatif untuk tantangan pembangunan urban di Papua. Memfasilitasi kemitraan antara universitas lokal dan lembaga penelitian internasional.
- 5.2.10 *Pengembangan Program CSR Terintegrasi*: Mendorong perusahaan swasta untuk menyelaraskan program CSR mereka dengan prioritas pembangunan urban daerah. Mengembangkan platform untuk koordinasi dan sinergi antar program CSR berbagai perusahaan.
- 5.2.11 *Penguatan Resolusi Konflik dan Pembangunan Kepercayaan*: Mengimplementasikan program-program dialog antar sektor dan antar komunitas untuk membangun kepercayaan. Melatih fasilitator lokal dalam teknik mediasi dan resolusi konflik.
- 5.2.12 *Pengembangan Skema Pendanaan Inovatif*: Mengeksplorasi opsi pendanaan alternatif seperti obligasi pembangunan daerah atau *crowdfunding* untuk proyek-

proyek urban tertentu. Mengoptimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus untuk mendukung inisiatif kolaborasi multi-sektor.

Implementasi rekomendasi ini perlu dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing wilayah di Tanah Papua. Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kolaborasi multi-sektor dalam mendukung pembangunan wilayah urban di Tanah Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M. (2015). Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives. *Journal of Urban Technology*, 22(1), 3-21.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16-32.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. BPS.
- Bamberger, M. (2012). Introduction to mixed methods in impact evaluation. *Impact Evaluation Notes*, 3, 1-38.
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (2004). *Economic Growth* (2nd ed.). MIT Press.
- Bibri, S. E., & Krogstie, J. (2017). Smart sustainable cities of the future: An extensive interdisciplinary literature review. *Sustainable Cities and Society*, 31, 183-212.
- Boissière, M., et al. (2013). Local Perceptions of Climate Variability and Change in Tropical Forests of Papua, Indonesia. *Ecology and Society*, 18(4).
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Brenner, N., & Schmid, C. (2015). Towards a new epistemology of the urban? *City*, 19(2-3), 151-182.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647-663.
- Cai, Y., & Etzkowitz, H. (2020). Theorizing the Triple Helix model: Past, present, and future. *Triple Helix*, 7(2-3), 189-226.
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. (2009). 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3-4), 201-234.
- Catley, A., Burns, J., Abebe, D., & Suji, O. (2013). *Participatory impact assessment: A design guide*. Feinstein International Center, Tufts University.
- Clarke, A., & Crane, A. (2018). Cross-Sector Partnerships for Systemic Change: Systematized Literature Review and Agenda for Further Research. *Journal of Business Ethics*, 150(2), 303-313.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Duflo, E., Glennerster, R., & Kremer, M. (2007). Using randomization in development economics research: A toolkit. *Handbook of Development Economics*, 4, 3895-3962.

- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university--industry--government relations. *Research Policy*, 29(2), 109-123.
- Etzkowitz, H., & Zhou, C. (2017). *The Triple Helix: University--Industry--Government Innovation and Entrepreneurship*. Routledge.
- Fatem, S. M., et al. (2018). Camouflaging economic development agendas with forest conservation narratives: A strategy of lower governments for gaining authority in the re-centralising Indonesia. *Land Use Policy*, 78, 699-710.
- Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., & Vermeersch, C. M. (2016). *Impact evaluation in practice*. World Bank Publications.
- Guerrero, M., & Urbano, D. (2019). A research agenda for entrepreneurship and innovation: the role of entrepreneurial universities. In *A Research Agenda for Entrepreneurship and Innovation*. Edward Elgar Publishing.
- Habitat for Humanity. (2022). *Global Housing Policy*.
- ILO. (2020). *World Employment and Social Outlook: Trends 2020*.
- IMF. (2021). *World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries*.
- Karlsson, M., Sjøvaag, H. (2019). Content analysis and online news: Epistemologies of analysing the ephemeral Web. *Digital Journalism*, 7(1), 51-72.
- Kartikasari, S. N., Marshall, A. J., & Beehler, B. M. (eds.) (2012). *Ekologi Papua*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia & Conservation International.
- Long-Sutehall, T., Sque, M., & Addington-Hall, J. (2011). Secondary analysis of qualitative data: a valuable method for exploring sensitive issues with an elusive population? *Journal of Research in Nursing*, 16(4), 335-344.
- Mansoben, J. R. (2018). The Socio-cultural Plurality of Papuan Society. In *Papua Road Map* (pp. 79-98). ISEAS Publishing.
- McKinsey Global Institute. (2021). *The Future of Urban Development & Infrastructure*.
- Miller, K., McAdam, R., & McAdam, M. (2018). A systematic literature review of university technology transfer from a quadruple helix perspective: toward a research agenda. *R&D Management*, 48(1), 7-24.
- Mollet, J. A. (2021). Special Autonomy and Development in Papua: A Recent Assessment. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 8(2), 189-207.
- OECD. (2020). *The Governance of Land Use in OECD Countries*.
- OECD. (2022). *The Digital Transformation of SMEs*.
- Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (2003). *The external control of organizations: A resource dependence perspective*. Stanford University Press.
- Provan, K. G., Fish, A., & Sydow, J. (2007). Interorganizational networks at the network level: A review of the empirical literature on whole networks. *Journal of Management*, 33(3), 479-516.
- Ragin, C. C. (2014). *The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies*. University of California Press.
- Roman, M., Varga, H., Cvijanovic, V., & Reid, A. (2020). Quadruple Helix Models for Sustainable Regional Innovation: Engaging and Facilitating Civil Society Participation. *Economies*, 8(2), 48.
- Slama, M., & Munro, J. (Eds.). (2019). *From 'Stone-Age' to 'Real-Time': Exploring Papuan Temporalities, Mobilities and Religiosities*. ANU Press.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
- Thornton, P. H., Ocasio, W., & Lounsbury, M. (2012). *The institutional logics perspective: A new approach to culture, structure, and process*. Oxford University Press.
- UN-Habitat. (2020). *New Urban Agenda*. United Nations.

- UNDP. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier - Human Development and the Anthropocene*.
- UNDP. (2021). *Accelerating Sustainable Development: Policy Interventions for Developing Countries*.
- UNEP. (2021). *Cities and Climate Change: An Urgent Agenda*.
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019). *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision*.
- White, H., & Raitzer, D. A. (2017). *Impact evaluation of development interventions: A practical guide*. Asian Development Bank.
- Widiyastuti, S., et al. (2018). Ethnobotanical study of medicinal plants used by local people in Jayapura, Papua Province, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 19(6), 2085-2094.
- World Bank. (2020). *Accelerating Growth and Poverty Reduction: A Policy Framework*.
- World Bank. (2021). *The World Bank Annual Report 2021: From Crisis to Green, Resilient, and Inclusive Development*.
- World Bank. (2021). *Sustainable Cities and Communities*. World Bank Urban Development Series.
- World Bank. (2022). *Worldwide Governance Indicators*.
- World Health Organization. (2022). "Urban Health". WHO Global Report on Urban Health.
- WTO. (2021). *World Trade Report 2021: Economic Resilience and Trade*.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications.